

**PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2011 DALAM RANGKA
MELINDUNGI CAGAR ALAM PULAU SEMPU di KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Chandralyn Octoriany Humendru

NIM. 200841001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG**

2014

Lembar Persetujuan Skripsi

**PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2011 DALAM RANGKA
MELINDUNGI CAGAR ALAM PULAU SEMPU KABUPATEN di
MALANG**

Diajukan Oleh :

Chandralyn Octoriany Humendru

NIM. 200841001

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang,.. Juni 2014

Pembimbing I



Hermanto Silalahi SH., M.Hum
NIK. 187007

Pembimbing II



Celina Tri Siwi SH., M.Hum
NIK. 103042

Lembar Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang

Pada... Juli 2014

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



Dr. R. Diah Imaningrum, SH., M.Hum
NIK. 191020

Penguji I



Hermanto Silalahi SH., M.Hum
NIK. 187007

Penguji II



Celina Tri Siwi SH., M.Hum
NIK. 103042

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Karya Malang



Hermanto Silalahi SH., M.Hum
NIK. 187007

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama: Chandralyn Octoriany Humendru

NIM : 200841001

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 3 Juli 2014

Yang Menyatakan



Chandralyn Octoriany Humendru

NIM. 200841001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chandralyn Octoriany Humendru
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 27 Oktober 1989
Agama : Katolik
Alamat Asal : Gunungsitoli/Nias/SUMUT
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
Alamat : Bukit Hijau Blok.C No.93

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Bhayangkari Nias : 1995 - 1996
2. SD Mutiara Nias : 1996 - 2002
3. SMP Negeri 1 Onan Runggu Samosir : 2002 - 2005
4. SMA Swasta Santo Xaverius Nias : 2005 - 2008
5. Universitas Katolik Widya Karya Malang : 2008 – 2014

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah

Demi perkembangan Ilmu pengetahuan, saya sebagai mahasiswa Universitas Unika Widya Karya Malang :

Nama : Chandralyn Octoriany Humendru

NIM : 200841001

Menyetujui skripsi/tugas akhir saya : **PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MELINDUNGI CAGAR ALAM PULAU SEMPU di KABUPATEN MALANG.**

Untuk dipublikasikan/ditampilkan dalam ADL (Aptik Digital Library) atau portal lain untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan UU Hak Cipta.

Demikian pernyataan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 3 Juli 2014

Yang Menyatakan



Chandralyn Octoriany Humendru

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Dalam Rangka Melindungi Cagar Alam Pulau Sempu di Kabupaten Malang”, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu sehingga terselesaikannya Skripsi ini:

1. Yesus Kristus sang Pencipta dan Bunda Maria atas keteladanannya.
2. Hermanto Silalahi SH.,M.Hum, sebagai Dosen pengajar mata kuliah hukum lingkungan, Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meberikan bantuan berupa bimbingan, dukungan, motivasi, dalam proses penyusunan skripsi.
3. Celina Tri Siwi.K.SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan ilmu, motivasi selama proses penyusunan skripsi.
4. FX. Supriady yang telah membantu saya dalam memperlancar segala administrasi selama proses penyusunan skripsi.
5. Seriady selaku staf Badan Konservasi Sumber Daya Alam Pulau Sempu yang telah memberikan bantuan berupa informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, inspirasi, perhatian yang tidak pernah ada habisnya.
7. Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa juga inspirasi yang begitu besar;
8. Buat orang tersayang, Andre Rivano Watimena, Angelita, beserta keluarga besar di Papua dan IPMAFA yang selama di malang memberikan dukungan

ABSTRAKSI

Nama: Chandralyn Octoriany Humendru

Judul : Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Dalam Rangka Melindungi Cagar Alam Pulau Sempu di Kabupaten Malang, ix+69 Halaman, 7 Tabel, 3 Gambar, 2 Lampiran, 12 Buku dan Jurnal, 4 Undang-Undang, 4 Internet, 1 Wawancara.

Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait keberadaan cagar alam Pulau Sempu. Sebagai pijakan teoritis penelitian ini menggunakan Teori Kelembagaan. Adapun jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*, teknik pengumpulan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait keberadaan cagar Pulau Sempu belumlah optimal dan belum sepenuhnya menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No, 28 Tahun 2011. Hal tersebut ditunjukkan melalui banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, yang berhubungan erat dengan kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

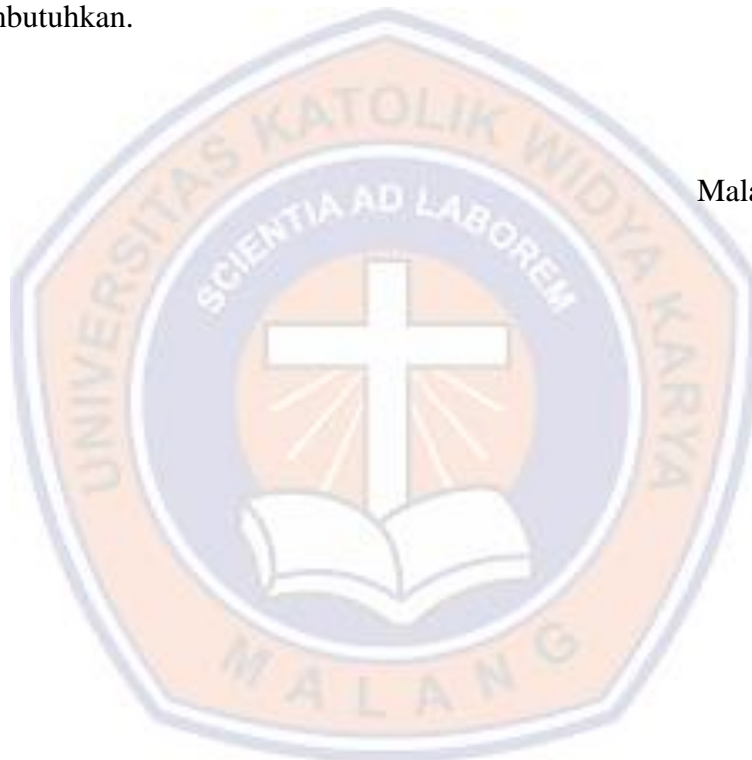
Implikasi teoritis menunjukkan bahwa, Teori Kelembagaan dapat menjelaskan secara detail pentingnya kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melestarikan cagar alam Pulau Sempu. Harapannya setelah adanya penelitian ini dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai referensi untuk melakukan optimalisasi kinerja dalam sebuah lembaga pemerintahan sehingga terciptanya keselarasan yang nantinya berdampak positif kepada masyarakat.

Kata Kunci: Cagar Alam Pulau Sempu, Kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 yang sudah sama-sama berjuang sampai tahap akhir (Megy, Sturmin, Yoga, Marco, Ka Herry, Ka Leo, dan teman lainnya).
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis, mengharapkan Skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Widya Karya dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 3 Juli 2014



Penulis

ABSTRACT

Name :Chandralyn Octoriany Humendru

Subject :Role of Natural Resources Conservation Center Based on Government Regulation No. 28 of 2011 in Order to protect the nature reserve Sempu Island in Malang, ix+ 69 Pages, 7 Tabels, 3 Picture, 2 Appendicies, 12 Book dan Journal, 4 Regulation, 4 Internet, 1 Interviews.

The research focuses on the role played by the Natural Resources Conservation Agency related to the presence Sempu Island nature reserve. As this study using the theoretical pijkan Institutional Theory. The type of qualitative research with a socio-legal approach, primary data collection techniques derived from interviews and observations, while secondary data, including books, journals, legislation and government documents.

These results indicate that the role of Conservation of NaturalResources related to the existence of reserves Sempu Island are not yet optimal and not yet fully implement the mandate of the Government Regulation No. 28 of 2011. This is shown by the many unresolved problems, which are closely related to the performance of Resources Conservation nature East Java.

Shows that the theoretical implications, Institutional theory can explain in detail the importance of the performance of Conservation of Natural Resources in preserving Sempu Island nature reserve. Hopes after this study can be used by governments as a reference to optimize the performance of a government agency and thus creating a harmony that will hedge positively to society.

Keywords: Sempu Island Nature Reserve, Performance Natural Resources Conservation Center.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

Lembar Persetujuan Skripsi

Lembar Pengesahan Skripsi

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

KATA PENGANTAR i

ABSTRAKSI iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Tujuan Penelitian 6

1.4. Manfaat Penelitian 6

1.5. Metode Penelitian 6

1.6. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

2.1. Teori Kelembagaan 15

2.2. Konsep Kehutanan 20

2.3. Konsep Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 22

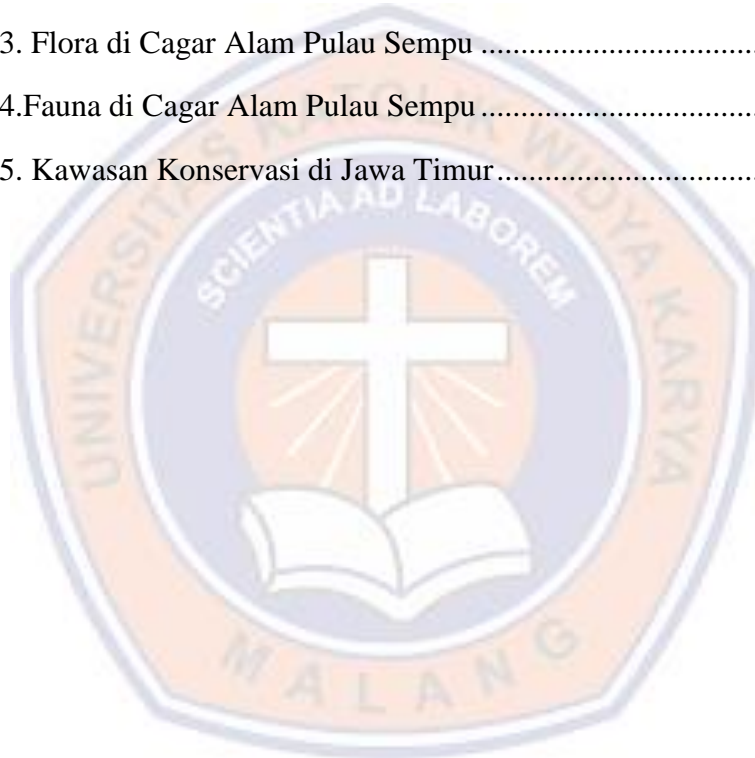
2.4. Penelitian Terdahulu 25

2.5. Alur Pemikiran 28

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
3.1.Gambaran Umum.....	30
3.1.1. Profil Cagar Alam Pulau Sempu.....	31
3.1.1.1. Keadaan Fisik Cagar Alam Pulau Sempu.....	31
3.1.1.2. Potensi Cagar Alam Pulau Sempu.....	33
3.1.1.3. Kondisi disekitar Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.....	39
3.2.1 Profil Balai Konservasi Sumber Daya Alam.....	40
3.2.1.1. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam.....	44
3.2.1. 2. Visi-Misi Balai Konservasi Sumber Daya Alam.....	45
3.2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam.....	46
3.2.1.4. Kawasan Konservasi Jawa Timur dan Permasalahan di Cagar Alam Pulau Sempu.....	47
3.2. Aktivitas BKSDA Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 dalam rangka melindungi cagar alam Pulau Sempu.....	54
3.3.1. Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu.....	56
3.2.2. Hambatan Unit Pelaksana Konservasi Cagar Alam Pulau Sempu.....	57
3.2.3. Upaya Konservasi Cagar Alam Pulau Sempu.....	60
BAB IV. PENUTUP.....	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	65
Daftar Pustaka.....	67
Lampiran.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Telaah Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2.2. Klasifikasi Informan	23
Tabel 3.1. Luas Blok Cagar Alam Pulau Sempu	31
Tabel 3.2. Luas Rumput Cagar Alam Pulau Sempu	32
Tabel 3.3. Flora di Cagar Alam Pulau Sempu	35
Tabel 3.4. Fauna di Cagar Alam Pulau Sempu	36
Tabel 3.5. Kawasan Konservasi di Jawa Timur	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Pemikiran Peneliti..... 29

Gambar 3.1. Luas Blok Cagar Alam Pulau Sempu..... 32

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Balai Koservasi Sumber Daya Alam 45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 69
Lampiran 2. Dokumentasi penelitian di Cagar Alam Pulau Sempu..... 95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kondisi geografis yang sangat strategis.¹Salah satu potensi tersebut adalah hutan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009:

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.²

Hutan merupakan satu penentu sistem penyangga kehidupan, dengan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Selain itu juga hutan berperan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat

¹Nilai Strategis karena ditinjau dari kondisi geografis memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan sulit untuk di perbaharui. Lihat, Amelda G.M. Salim. (2016). *Formulasi Kebijakan Model Sistem Tentang Daerah Perbatasan di Gugusan Pulau Pasir Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Malang: Uiversitas Brawijaya. Hlm.1.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-jawab.³

Adanya penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintah daerah, sebagai pelaksana pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten atau kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.⁴

Secara keseluruhan kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 395/Menhut-II/2011 tanggal 21

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

Juli 2011 sebesar 1.361.145 Ha yang terdiri dari hutan produksi tetap sebesar 782.772 Ha, Hutan Lindung sebesar, 344.742 Ha. Sedangkan kawasan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam (IKSA/ KPA) dan Provinsi Jawa Timur sebesar 233.632 Ha, yang terbagi antara daratarn sebesar 230.126 Ha dan perairan sebesar 3.506 Ha.⁵

Hutan memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai kawasan konservasi, yang memiliki ciri khas, keanekaragaman hayati dan keunikan yang berkembang secara alami didalamnya. Untuk mengelola kawasan konservasi pemerintah telah menetapkan peraturan Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengolahan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan konservasi di wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari hutan lindung, taman nasional, suaka margasatwa, taman wisata alam dan hutan raya.⁶ Salah satu kawasan cagar alam tersebut adalah cagar alam Pulau Sempu yang terletak di Kabupaten Malang.

Pulau Sempu berdasarkan kondisi geografis terletak di antara 112°40'45'' - 112°42'45'' Bujur Timur dan 8°27'24'' - 8°24'54'' Lintang Selatan, dengan luas sekitar 877hektar. Berdasarkan sejarah Pulau Sempu menjadi cagar alam, atas dasar dikeluarkannya SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 46.Stbld No. 49 tanggal 15 Maret 1928.⁷ Pulau Sempu memiliki keanekaragaman hanyati, sehingga beberapa tahun terakhir ini muncul sebuah prespektif bahwa Pulau

⁵ Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2015). *Laporan Jawa Timur Rapat Monev, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan*. Semarang. Hlm. 2

⁶ Yoppy K. Situmorang. (2014). *Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Ditinjau Dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tanhun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Malang. Universitas Brawijaya. Hlm. 6.

⁷*Ibid.*,Hlm 7.

Sempu merupakan objek wisata. Hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan, banyaknya kunjungan pelaku wisata ke Pulau Sempu yang meningkat setiap tahunnya membuat terjadinya berbagai kerusakan seperti, penumpukan sampah, kerusakan terumbu karang, penebangan batang-batang pohon untuk membakar ikan, pemadatan tanah sebagai akibat dari adanya aktivitas pariwisata yang tidak berorientasi pada konservasi dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan kawasan yang tidak terarah dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pengelola membuat praktek-praktek kejahatan lingkungan dan akan semakin memperparah kerusakan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tata gubahan di Pulau Sempu.

Melihat hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7:⁸

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis tumbuhan beserta gejala dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan berkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Permasalahan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 33⁹:

Cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; penyerapan dan / atau penyimpanan karbon; dan pemanfaatan sumber plasma mutfah untuk penunjang budidaya.

Oleh sebab itu Pulau Sempu menjadi cagar alam yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang kemudian menunjuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BKSDA) sebagai unit pelaksana

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

⁹ *Ibid.*

teknis konservasi sumber daya alam melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, guna mengelola, menjaga dan melindungi kawasan cagar alam Pulau Sempu sehingga dapat terciptanya optimalisasi fungsi, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan keberadaan Pulau Sempu.

Hal ini menarik bagi peneliti sehingga, peneliti mengangkat permasalahan ini ke dalam judul penelitian **“Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Dalam Rangka Melindungi Cagar Alam Pulau Sempu di Kabupaten Malang Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, terkait mengapa penelitian ini harus dilaksanakan, dapat diambil sebuah rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 Dalam rangka melindungi cagar alam Pulau Sempu di Kabupaten Malang Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang terencana dan terarah dengan baik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 dalam rangka melindungi cagar alam Pulau Sempu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berhasil yaitu penelitian yang mampu memberikan manfaat baik secara teoritik ataupun secara praktis yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan kajian dan konsep yang lebih mendalam tentang pengaplikasian suatu peraturan perundang-undangan, penegakan hukum untuk melindungi kawasan konservasi cagar alam Pulau Sempu. Sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan dapat meningkatkan kualitas suatu lembaga pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a) Penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkemungkinan terkait permasalahan di kawasan konservasi. Kemudian melalui adanya penelitian ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan demikian dapat terciptanya keselarasan dalam kehidupan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dimana penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di

dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Selain itu berdasarkan jenisnya, maka tipe penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis secara faktual dan akurat, mengetahui peran BKSDA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, melalui adanya penjabaran yang sistematis.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif dibidang ilmu hukum. Dalam penelitian kualitatif lebih mengutamakan kedalaman data yang didapatkan. Di tinjau dari bidangnya, penelitian ini adalah penelitian *socio legal studies*. Dalam studi hukum, memerlukan sebuah pendekatan baik pendekatan hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan, atau bagaimana efektifitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologiannya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum.¹⁰

Selain itu juga adalah pendekatan hukum non-doktrinal ini masuk dalam ranah kajian *socio legal studies*, sebab hukum dikonsepsikan sebagai aturan yang mengikat masyarakat, dengan demikian penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai hukum positif yang dikeluarkan oleh lembaga dan sekaligus dikaji

¹⁰ Sulistyowati, dkk (ed). (2012). *Kajian socio-legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen. Hlm.1.

bagaimana aturan tersebut diberlakukan dan nampak dari pemegang peran. Oleh sebab itu dengan penggunaan pendekatan *sociolegal* ini diharapkan mampu menjelaskan peran BKSDA dalam rangka melindungi cagar alam Pulau Sempu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011.

1.5.3. Sumber Data Penelitian

Dalam proses penelitian data yang dikumpulkan haruslah relevan dengan pokok permasalahan yang ada. Terdapat dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan sebuah data diperoleh secara langsung dalam proses penelitian di lokasi yang ditinjau sebagai tempat dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dapat berupa hasil wawancara yang dapat diperoleh dari proses wawancara (*Interview*). Data wawancara tersebut dapat berbentuk rekaman ataupun catatan yang dilakukan oleh peneliti, selain dengan wawancara data primer juga dapat di peroleh melalui pengamatan (*Observasi*) yang dapat dilakukan peneliti di lokasi penelitian.¹¹

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia selama peneliti melakukan penelitian data tersebut antara lain, berupa teks: dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk. Data yang berupa gambar: foto,

¹¹ Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 209

animasi. Data yang berupa suara: hasil rekaman. Atau kombinasi teks, gambar dan suara: film, video, iklan di televisi.

1.5.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasi lokasi penelitian menjadi dua yaitu; *pertama* BKSDA Malang, dengan adanya penelitian di BKSDA Malang akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan sumber data, sebab yang menjadi fokus penelitian adalah peran yang dilakukan oleh BKSDA Malang yang secara integral berada di bawah otoritas BKSDA Jawa Timur, sehingga setiap agenda atau program kerja dilaksanakan searah dengan sesuai dengan peraturan kelembagaan yang ada. *Kedua*, peneliti melakukan penelitian di Pulau Sempu Kabupaten Malang, dengan melakukan penelitian langsung atau observasi, semakin mempermudah peneliti untuk menganalisa masalah-masalah yang ada, sehingga terciptanya korelasi antara peran yang dilakukan oleh BKSDA dengan kondisi yang terdapat di lapangan.

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dilapangan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data informasi secara lisan dengan tujuan untuk menghimpun atau mengumpulkan data berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan keinginan seseorang yang dilakukan terhadap obyek orang, sumber atau instansi

yang bersangkutan. Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*Informal Conversational Interview*), wawancara umum yang terarah (*General Interview Guide Approach*), dan wawancara terbuka yang standart (*Standardized Open-ended Interview*).

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, maka dibutuhkan kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang mana dalam proses wawancara dilakukan dengan cara berdiskusi, sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif antara peneliti dan narasumber. Oleh sebab itu peneliti diharapkan mampu sabar saat melakukan proses wawancara dengan para narasumber.¹³

2. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang menggunakan alat bantu indera pengelihatian yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kegiatan observasi ini meliputi pencatatan secara sistematis sebuah fenomena, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dapat dilakukan dengan cara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Kemudian berlanjut kepada tahapan selanjutnya peneliti melakukan observasi secara terfokus, yang dimana peneliti mulai menyempitkan penelitiannya sehingga

¹² *Ibid.*, Hlm 224

¹³ *Ibid.*, Hlm 224-225

terbentuknya pol-pola pemikiran yang dapat dijabarkan kemudian oleh peneliti dalam suatu tulisannya.¹⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.¹⁵ Dokumentasi adalah pengambilan data dengan cara melakukan studi dokumentasi atau pencatatan pokok-pokok data. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan-catatan baik yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

1.5.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisir data sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Tujuannya untuk menganalisis berlangsungnya proses fenomena sosial dan memperoleh sebuah gambaran yang secara tuntas terhadap proses tersebut serta menganalisa terhadap makna yang ada dibalik informasi, data dan memproses suatu fenomena sosial yang terjadi. Setiap data yang nantinya diperoleh dari penelitian di lapangan akan dianalisis secara mendalam sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴*Ibid.*, 2006. Hlm 224

¹⁵ Nasution. (2003). *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.143

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, data awal yang muncul dari catatan lapangan. Langkah dari mereduksi data adalah menajamkan analisis, menggolongkan setiap permasalahan sehingga dapat diverifikasi. Melalui reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan akan membeikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data, semakin lama peneliti berada di lapangan makan semakin banyak pula data yang diperoleh, dengan mereduksi maka data yang telah diperoleh tidak menumpuk sehingga mempermudah dalam menganalisis.

2. Penyajian Data

Setelah melalui tahap reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskriptif, bagan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dalam tahap ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi dapat disimpulkan dan memiliki maka sesuai dengan temuan dilapangan.

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu sistematika agar suatu penelitian dapat disajikan secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berkaitan dengan peran BKSDA berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai kajian pustaka yang terdapat konsep kehutanan, dan teori kelembagaan. Selanjutnya, terdapat penjabaran terkait penelitian terdahulu dan alur pemikiran yang peneliti gunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan terkait metode-metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data, selama dilapangan. Melalui adanya metode penelitian tersebut peneliti mampu menjabarkan temua-temuan yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat diperolehnya sebuah kesimpulan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah, profil keberadaan cagar alam Pulau Sempu secara administrasi, beserta penjabaran mengenai lembaga yang bertanggung jawab terkait keberadaan cagar alam Pulau Sempu, dan permasalahan yang terjadi terkait cagar alam Pulau Sempu. Melalui adanya pembahasan tersebut dapat memberikan penjelasan yang faktual terkait penelitian ini.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menjabarkan terkait peran yang dilakukan oleh BKSDA sesuai dengan peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 dalam menjaga cagar alam di Pulau Semupu, berlandaskan dengan teori kelembagaan sebagai pisau analisisnya. Dengan demikian dapat diperoleh sebuah jawaban atas rumusan masalah yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini, menjabarkan sebuah kesimpulan terkait dengan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian penulis juga akan menjelaskan tentang saran kepada pemeliti selanjutnya dan sebuah rekomendasi kepada pemerintah berkenaan dengan pengoptimalisasian peran lembaga pemerintah, sehingga dapat terciptanya keselarasan.

